

Judul : Program Hilirisasi Tambang: Warga Lokal Jangan Cuma Pekerja Kasar
Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Program Hilirisasi Tambang Warga Lokal Jangan Cuma Pekerja Kasar

SENAYAN mendorong Pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap program hilirisasi tambang. Hal ini penting mengingat program hilirisasi yang tengah berjalan saat ini belum sepenuhnya memberi dampak ekonomi bagi negara.

“Program hilirisasi tambang masih jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area pertambangan,” kata anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Karena itu, dia berharap, pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat melakukan evaluasi atas program hilirisasi yang tengah berjalan saat ini, sehingga program hilirisasi tambang di masa mendatang bisa jauh lebih sempurna.

“Tidak ada lagi anggapan yang menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam,” jelas anggota Fraksi PKS ini.

Dia mengatakan, sumber daya alam seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Bukan sebaliknya, malah membuat hidup masyarakat semakin memprihatinkan. Sebab yang terjadi saat ini adalah anomali terhadap kekayaan sumber daya alam.

“Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya sumber daya alam, atau daerah yang digencarkan program hilirisasi. Sering disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ atau *deutch disease* ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” harapnya.

Mulyanto menduga, anomali kemiskinan masyarakat di tengah kekayaan sumber daya alam ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dana pembangunan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah. Termasuk, merebaknya kasus-kasus korupsi tambang.

“Pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” terangnya.

Dia melihat masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpanan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan pertanian di daerah tersebut. Sudah sepatutnya kebijakan hilirisasi tambang ini dievaluasi secara komprehensif.

Dia juga mendesak Pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (Nickel Pig Iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan *smelter* kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

Tidak kalah pentingnya, audit komprehensif terhadap *smelter-smelter* dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja.

“Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi, sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik *smelter* yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dan lain-lain,” pungkasnya. ■ KAL